

DAFTAR PUSTAKA

- Wafula FN, Miriti EM, Goodman CA. *Examining characteristics, knowledge and regulatory practices of specialized drug shops in Sub-Saharan Africa: A systematic review of the literature*. BMC Health Serv Res. 2012;12(1).
- Shah SSAM, Naqvi BS, Fatima M, Khaliq A, Sheikh AL, Baqar M. *Quality of drug stores: Storage practices & regulatory compliance in Karachi, Pakistan*. Pakistan J Med Sci. 2016;32(5):1071–6.
- Miller R, Goodman C. *Performance of retail pharmacies in low- and middle-income Asian settings: a systematic review*. Health Policy Plan. 2016;31(7):940–53.
- Kuntaman, Karuniawati A, Gunardi WD, dkk. 2022. *Surveilans resistensi antibiotika Rumah Sakit di Indonesia tahun 2021*. Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI), Jakarta. hlm.96.
- Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA). *Laporan pelaksanaan program kerja pengendalian antimikroba Rumah Sakit Islam (RSI) Pati*. 2022.
- Kho BP, Hassali MA, Lim CJ, Saleem F. *Challenges in the management of community pharmacies in Malaysia*. Pharm Pract (Granada). 2017;15(2):1–10.
- Mills D. *Cybermedicine: The Benefits and Risks of Purchasing Drugs Over The Internet*. J Technol Law Policy [Internet]. 2000;5(2):1–14. Available from: <http://scholarship.law.ufl.edu/jtlp> Available at: <http://scholarship.law.ufl.edu/jtlp/vol5/iss2/1>
- WORLD HEALTH ORGANIZATION(WHO). *The legal and regulatory framework for community pharmacies in the WHO European Region [Internet]*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2020. p.1–100. Available from: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331232/9789289054591-rus.pdf>
- Pratama R. *Meski Sama-sama Jual Obat, Apotek dan Toko Obat Ada Bedanya*. Jul 2022;
- Saba HKP. 09 Mei 2023. *Kenalan dengan tenaga teknis kefarmasian dan surat tanda registrasi TTK*. Farmacare.id

Adityawarman. *Puluhan toko obat tak berizin di Tangerang diawasi pemerintah*[Internet]. 2019; Available from: <https://www.antaranews.com/berita/789853/puluhan-toko-obat-tak-berizin-di-tangerang-diawasi-pemerintah>

Anonim. *Membedah Bisnis Farmasi di Minimarket. Farmacare.id* [Internet]. 2022; Available from: <https://www.farmacare.id/membedah-bisnis-farmasi-di-minimarket>

Dewi RK. *Wawancara ketua PAFL*. 2023.

Anonim. *Profil Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2020*. Pati; 2020. hlm.6-7.

Alexandra Indriati Dewi. (2008). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. hlm.2

Efendi Jonaedi RP. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. kedua. Jakarta: Kencana; 2016. hlm.151–52.

Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia; 2005. hlm.1.

Moelong LJ. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2022. hlm.157–216.

Soekanto S. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2020. hlm.11.

Nugroho SS, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. 2020. hlm. 41-43.

Irwanto. *Focused Group Discussion (FGD): Sebuah pengantar praktis*. Edisi 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2006. hlm.1.

Sugarda, YB. *Panduan Praktis Pelaksanaan Focus Group Discussion Sebagai Metode Riset Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2020. hlm.1.

Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: LPPM Universitas Bung Hatta; 2022. hlm.26-27

Wahyati E, Dewi TN, Pancasiwi H. *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan*. Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata. Semarang. 2017. hlm.8.

Soekanto S. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2020. hlm.43-44.

Soekanto S. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2020. hlm.85-86.

- Wantu, F.M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia; 2015. hlm. 19-28.
- Yuhelson, H. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing; 2017. hlm. 26-62.
- Nur Basuki Winanmo. *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*. Laksbang mediatama. Yogyakarta, 2008. hlm. 65-75.
- Purwito E. *Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluarsa di Kota Surabaya*. DEKRIT. 2023;13(1):109-29.
- Widjaja W, Yani A. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2001. hlm. 5-64.
- Barkatullah, AH. *Hak-hak konsumen*. Yogyakarta: Nusa Media; 2010. hlm.3-5
- Syafii, I.K. *Manajemen pemerintahan*. Jakarta: Pertja, 1998. hlm.60.
- Lembaga Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996. hlm. 163.
- Doloking H. *Pengantar ilmu farmasi [Internet]*. Syahadah Creative Media. 2017. hlm.65. Available from: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/7289>
- Widjaja G. *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama; 2003. hlm.58.
- Supryadi A, Oktaviani N. *Tugas dan tanggung jawab hukum apoteker dalam pelayanan kefarmasian*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. 2023;14:110-25
- <https://news.detik.com/berita/d-3394688/bbpom-metro-bongkar-peredaran-obat-keras-di-toko-obat-di-padang> diakses pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 13.00 WIB.
- Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang tahun 2023. hlm.1
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990, h. 85.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. h.117

Norma Sari. *Pemberdayaan Hak Konsumen atas Informasi Obat*. Jurnal Media Hukum. 2014;21(2):294-308.

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (6).

Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagian Kesebelas Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES) No.26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan BPOM No.24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 12 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 15 tahun 2003 tentang Izin, sertifikat dan rekomendasi bidang kesehatan.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 54 tahun 2021 tentang Pendelegasian kewenangan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha kepada Kepala Dinas penanaman modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pati.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 61 tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan.